BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim mahkamah konsttusi yang merubah rumusan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :84/PUU-XXI/2023 didasarkan pada makna terhadap istilah “tempat perdagangan” dan “barang” yang tidak dapat lagi dimaknai dalam arti sempit sebagai suatu perdagangan yang bersifat konvensional melainkan juga harus ditafsirkan secara luas sebagai tempat perdagangan berbasis teknologi digital hal ini bertujuan agar UU Hak Cipta dapat mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran hak cipta pada bidang teknologi digital yang selama ini berlindung dalam prinsip safe harbour akibat dari sempitnya penafsiran tempat perdagangan pada pasal 10 UU Hak Cipta. Perubahan rumusan tersebut menciptakan kondisi baru kepada platform digital sebagai subyek yang dapat dibebankan tanggung jawab namun menurut penulis hal tersebut masih belum memberikan kepastian hukum yang adil kepada pemilik karya hak cipta untuk dapat menuntut hak moril dan dan hak ekonomis kepada platform digital.

2. Adanya perluasan definisi “tempat perdagangan” dan “barang” sebagai tempat perdagangan berbasis teknologi digital memberikan keadaan hukum baru terhadap pertanggungjawaban hukum kepada subjek penyelenggara sistem elektronik yang mengubah pandangan terhadap penerapan tanggung jawab hukum pelanggaran hak cipta yang selama ini menggunakan prinsip safe harbour. Sehingga, teori strict liability yang dimodifikasi merupakan suatu langkah terobosan dalam UU Hak Cipta untuk dapat menuntut tanggung jawab kepada pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dibidang layanan digital. Dengan

menggunakan teori strict liability yang dimodifikasi maka pengelola platform digital berbasis UGC dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan karya lagu dalam pembuatan konten yang termuat di dalam platform digitalnya selama tidak adanya itikad baik dalam menjalankan sistem pencegahan pelanggaran hak cipta pada Platform Digital yang dimilikinya serta niat untuk memanfaatkan secara komersial terhadap karya hak cipta yang digunakan pada pembuatan konten ketika diunggah ke dalam platform digital oleh penggunanya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap hasil penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terutama Komisi X Bidang Pendidikan, Olahraga, Sains dan Teknologi untuk sebaiknya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan karya hak cipta pada platform digital dengan merujuk pada pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 84/PUU-XXI/2023. Sehingga, dapat memberikan kepastian perlindungan hak moril dan hak ekonomis kepada pemegang karya hak cipta

2. Bagi Kementerian Komunikasi Digital dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu membuat suatu aturan teknis yang mengatur terkait tanggung jawab hukum bagi Pengelola Platform Digital berbasis UGC dalam menjalankan sistem pencegahan pelanggaran hak cipta beserta sanksinya sehingga dapat memudahkan pemilik karya hak cipta untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pengelola Platform ketika terjadi pelanggaran hak cipta pada platform digital yang dikelolanya.